

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan *Fiscal Stress* terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan

Effects of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds, and Fiscal Stress on The Level of Independence in The Province of South Kalimantan

Aryadhani Prasetyo*, Dr. Dewi Rahayu, SE, MP

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
aryadhaniprasetyo@gmail.com

Abstract

This research was conducted to (1) analyze the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds and Fiscal Stress that affect the level of independence both simultaneously and partially in the Province of South Kalimantan; (2) to analyze what are the most dominant variables affecting the level of independence in the province of South Kalimantan.

The data obtained in this study is from the official website of the South Kalimantan Provincial Government, namely the Central Kalimantan Statistics Agency, which deals with the South Kalimantan Provincial Government Financial Report and the 2002-2016 Budget Realization Report, which is available in BPS publication data entitled South Kalimantan in Figures.

The results of the study show that (1) Local Revenue, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds, and Fiscal Stress have an effect on the level of independence simultaneously; (2) Regional Original Income dan Profit Sharing Funds affect the Level of Independence; (3) General Allocation Funds and Fiscal Stress have no significant effect on the Level of Independence; and (4) Regional Original Income is the most dominant variable that affects the Level of Independence.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, Fiscal Stress, Level of Independence.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk (1) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian baik secara simultan maupun parsial di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) untuk menganalisis variabel apa yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

Data yang didapat dalam penelitian ini dari *website* resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Laporan

Realisasi Anggaran Tahun 2002-2016 yang tersedia dalam data publikasi BPS yang berjudul Kalimantan Selatan Dalam Angka.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, (1) PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian secara simultan; (2) PAD dan DBH berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian; (3) DAU dan *Fiscal Stress* berpengaruh tidak nyata terhadap terhadap Tingkat Kemandirian; dan (4) Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, *Fiscal Stress*, Tingkat Kemandirian

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom demi merencanakan kebutuhan masyarakat di sana berdasarkan gagasan sendiri dan cita-cita masyarakat sebanding dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2002:61). Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka menciptakan kekuasaan yang seluas-luasnya untuk daerah.

Kinerja keuangan daerah ialah tingkat pencapaian sebuah daerah dalam mendapatkan hingga menggunakan semua sumber keuangan asli daerahnya. Terdapat beberapa rasio dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Tingkat kemandirian menjabarkan ketergantungan daerah atas sumber dana eksternal.

Selain PAD yang berperan sebagai tulang punggung perkembangan dan pembangunan suatu daerah, DAU dan DBH ialah komponen belanja pada APBN namun pada APBD diakui sebagai komponen pendapatan yang berperan untuk memaksimalkan perkembangan dan pembangunan suatu daerah. DAU merupakan dana untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang telah dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah yang berasal dari pendapatan APBN. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berlandaskan angka persentase untuk memenuhi kepentingan daerah dalam bentuk pelaksanaan desentralisasi yang telah dialokasikan ke daerah yang berasal dari pendapatan APBN.

Tingkat kesiapan masing-masing daerah tidak memiliki tingkat kesiapan yang sama baik dari segi sumber daya daerah maupun kemampuan daerahnya. Peningkatan penekanan fiskal (*fiscal stress*) yang dihadapi daerah lebih besar dibanding era sebelum otonomi. Dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat daerah dituntut untuk memaksimalkan setiap kemampuan maupun kapasitas fiskalnya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka dari itu rumusan masalah penelitian yaitu: (1) Apakah PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian baik secara simultan maupun parsial di Provinsi Kalimantan Selatan?. (2) Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan?.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami apakah PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian baik secara simultan maupun

parsial di Provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom demi merencanakan kebutuhan masyarakat di sana berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat sebanding dengan peraturan perundang-undangan. Berarti otonomi daerah yaitu perwujudan tentang penerapan kegiatan pemerintah menurut asas desentralisasi ialah penyerahan kegiatan pemerintah kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri.

Adapun tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien, masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing, adanya kesetaraan politik, setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing (Sujarweni, 2015:21).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Yani, 2002:51) berpendapat bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bermaksud untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Apabila pemerintah daerah memiliki PAD yang besar maka akan semakin membuat tingkat kemandirian meningkat karena ketergantungan daerah terhadap pusat semakin berkurang.

Dana Alokasi Umum (DAU)

(Halim, 2014:125) menyatakan “Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu salah satu dana pemberian pemerintah ke pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan maksud pemerataan kinerja keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah untuk rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditujukan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembagian DAU untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota dipastikan menurut dengan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah menurut angka yang telah ditentukan guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan kekuasaan ke daerah oleh pusat, dana ini berasal dari pendapatan APBN. Tujuan DBH yaitu memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan sumbernya, yang berarti penerimaan bagian daerah dibagikan berdasar atas daerah penghasil.

Fiscal Stress

Tekanan yang dialami daerah akibat adanya keterbatasan penerimaan pendapatan pada anggaran yang telah dibuat yang mana akan digunakan untuk meningkatkan kemandirian daerah serta untuk membiayai kebutuhan daerah, kondisi tersebut dapat dikatakan ialah *Fiscal Stress* atau tekanan anggaran. Ketersediaan sumber-

sumber daya potensial dan kesiapan SDM yang baik di daerah merupakan faktor penting dalam era otonomi daerah. Tekanan anggaran ditentukan berdasarkan realisasi penerimaan dibandingkan dengan nilai potensi PAD. Upaya pajak (*Tax Effort*) yang besar menggambarkan tingkat *Fiscal Stress* yang lebih besar, namun kondisi tersebut merupakan gejala yang baik karena pengupayaan pajak sedang berlangsung.

Kinerja Keuangan Daerah (Tingkat Kemandirian)

Semakin besar tingkat kemandirian daerah memiliki arti bahwa daerah tidak lagi bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat dan begitu juga sebaliknya. Tingkat kemandirian mendeskripsikan ketergantungan terhadap sumber dana dari luar atau eksternal. Tingkat kemandirian pun menjelaskan tingkat kontribusi rakyat pada pembangunan daerahnya. Meningkatnya tingkat kemandirian, meningkat pula kontribusi rakyat dalam membayar kewajibannya seperti pajak dan retribusi daerah yang menjadi bagian utama PAD. Meningkatnya jumlah rakyat membayar pajak dan retribusi daerah maka tingkat kesejahteraan rakyatnya pun ikut meningkat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Monica Verginia (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan PAD memiliki pengaruh positif pada Tingkat Kemandirian, sedangkan variabel DAU tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian dan DAK memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian. Jumlah dan jenis variabel yang digunakan merupakan letak perbedaan penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress*, tidak terdapat variabel DAK.

Sementara M. Abduh (2018) menyatakan dengan hasil penelitiannya yaitu PAD memiliki pengaruh positif pada Tingkat Kemandirian. Variabel DAU dan DBH memiliki pengaruh negatif pada Tingkat Kemandirian, sedangkan variabel *Fiscal Stress* tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian. Tempat/lokasi penelitian yang mana penelitian ini hanya mencakup Provinsi saja merupakan letak perbedaan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang dilakukan M. Abduh mencakup Kabupaten/Kota.

Hipotesis

Hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian baik secara simultan maupun parsial di Provinsi Kalimantan Selatan; dan (2) PAD adalah faktor paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan data yang didapat dari *website* resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2002-2016 yang tersedia dalam data publikasi BPS yang berjudul Kalimantan Selatan Dalam Angka.

Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berupa deskriptif analisis ialah penelitian yang menjabarkan dan menjelaskan variabel-variabel independen guna menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik akumulasi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Untuk mendapatkan seluruh data dan teori didapatkan dari *literature*, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan hasil penelitian sebelumnya yang sesuai serta juga melalui *internet*. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data *time series* selama lima belas tahun yaitu dari tahun 2002-2016.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Berganda (*Time Series*)

Analisis regresi linier berganda yang dimaksudkan untuk memastikan hubungan linier antara sebagian variabel bebas dengan variabel terikat.

Model persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \text{Log}\beta_0 + \beta_1\text{Log}X_{1t} + \beta_2\text{Log}X_{2t} + \beta_3\text{Log}X_{3t} + \beta_4\text{Log}X_{4t}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemandirian (Persen)

X₁ = PAD (Milyar Rupiah)

X₂ = DAU (Milyar Rupiah)

X₃ = DBH (Milyar Rupiah)

X₄ = *Fiscal Stress*

β₀ = Konstanta

β_i = Parameter (i= 1, 2, 3, 4)

t = Tahun (2002-2016)

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Untuk memastikan apakah timbul hubungan yang kuat diantara variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam penyusunan model maka digunakan uji multikolinieritas. Menurut Ghozali (2006:91) “Penguujian multikolinieritas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya nilai toleransi dan *Varince Inflation Factor* (VIF), apabila nilai toleransi < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas”.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ikhsan (2014:188) Uji Heteroskedastisitas dibutuhkan dalam menguji apakah pada model regresi linier kesalahan pengganggu (e) memiliki variabel yang sama atau tidak dari satu penelitian ke penelitian yang lain. Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji Gletsjer, hasil uji Gletsjer menunjukkan bahwa variabel penelitian ini bebas heteroskedastisitas dibuktikan dengan tidak terdapatnya variabel bebas yang signifikan pada tingkat 5% atau apabila prob. F hitung < alpha 0,05.

Uji Autokorelasi

Menurut Ikhsan (2014:186) “Uji Autokorelasi diperlukan dalam menguji apakah pada suatu model regresi linier terjadi hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)”. Uji dapat digunakan dengan menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM (Lagrange Multiplier) Test. Apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil maka dipastikan terjadi autokorelasi sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih besar maka tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Koefisiensi Determinasi (R^2)

Menurut Gujarati (2010:94) “Koefisien determinasi merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya”. Nilai R^2 yang sempurna adalah 1 (satu). Guna mengetahui seberapa besar variasi bebas dapat menjelaskan dengan baik variabel terikat maka dilakukan pengujian hipotesis koefisien determinasi (R^2). Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar pula variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik.

Uji-F (Simultan)

Uji F adalah pengujian hubungan regresi secara bersama-sama yang memiliki tujuan untuk mencari tahu apakah semua variabel bebas bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, yang berarti variabel X_1, X_2, X_3, X_4 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, yang berarti variabel X_1, X_2, X_3, X_4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.

Kaidah keputusan:

Fhitung < Ftabel atau Prob. F > 0,005 : H_0 diterima.

Fhitung > Ftabel atau Prob. F < 0,05 : H_0 ditolak.

Uji-t (Parsial)

Uji yang digunakan secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara terpisah atau individu terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel X_i tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

$H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel X_i berpengaruh terhadap variabel Y.

Kaidah keputusan:

$T_{hitung} < t_{tabel}$ atau Prob. t > 0,05 : H_0 diterima.

$T_{hitung} > t_{tabel}$ atau Prob. t < 0,05 : H_0 ditolak.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Tabel 1
 Hasil Output Regresi Linier Berganda (*Time Series*)

Variable	Coefficient	Std. Error
C	35,895630	14,707050
PAD (X_1)	16,112180	4,305398
DAU (X_2)	-6,146741	5,496552
DBH (X_3)	-9,940349	3,414845
Fiscal Stress (X_4)	8,300804	5,038653
R-squared = 0,775123	Adjusted R-squared = 0,685172	

Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)

Dari hasil output analisis regresi linier berganda di atas didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_t = 35,895630 + 16,112180X_{1t} - 6,146741X_{2t} - 9,940349X_{3t} + 8,300804X_{4t}$$

Dilihat dari persamaan di atas maka dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 35,895630 menunjukkan bahwa apabila PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* sama dengan 0 (nol)

maka Tingkat Kemandirian adalah sebesar 35,895630%. PAD (X_1) mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 16,112180 yang berarti apabila terjadi perubahan variabel PAD sebesar 1% akan menaikkan Tingkat Kemandirian sebesar 16,112180% dengan asumsi variabel-variabel lain tetap. DAU (X_2) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar -6,146741 tetapi pengaruhnya tidak signifikan. DBH (X_3) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar -9,940349 yang berarti apabila terjadi perubahan variabel DBH sebesar 1% akan menurunkan Tingkat Kemandirian sebesar 9,940349% dengan asumsi variabel-variabel lain tetap. *Fiscal Stress* (X_4) mempunyai koefisien bertanda positif sebesar 8,300804 tetapi pengaruhnya tidak signifikan.

Hasil pengujian asumsi klasik dengan uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF untuk PAD sebesar 20,30, nilai DAU sebesar 11,14, nilai DBH sebesar 14,40 dan untuk nilai *Fiscal Stress* sebesar 1,55. Berdasarkan uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa semua variabel PAD, DAU, DBH terjadi multikolinieritas sedangkan untuk variabel *Fiscal Stress* itu tidak terjadi multikolinieritas.

Untuk uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai Prob. F hitung sebesar $0,9312 > 0,05$ maka dari itu dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji autokorelasi menunjukkan bahwa Prob. F hitung memiliki angka sebesar $0,8579 > 0,05$ (5%) yang mana bisa disimpulkan autokorelasi tidak terjadi.

Pada Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Berganda dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,685172. Hal ini mengindikasikan bahwa 0,685172 atau 68,5172% Tingkat Kemandirian dipengaruhi oleh 4 variabel independen PAD, DAU, DBH, *Fiscal Stress* sedangkan 31,4828% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pembahasan

Tabel 2
 Hasil Uji-F (Simultan)

Variable	F-Statistic	Prob (F-Statistic)	Keterangan
Regression	8,617179	0,002804	Signifikan

Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)

Pada Tabel 2 dapat dilihat secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian dengan nilai Prob. F(Statistic) sebesar $0,002804 < 0,05$. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Monica Verginia (2017) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Tabel 3
 Hasil Uji-t (Parsial)

Variable	t-Statistic	Prob.	Keterangan
PAD (X_1)	3,742322	0,0038	Signifikan
DAU (X_2)	-1,118290	0,2896	Tidak Signifikan
DBH (X_3)	-2,910923	0,0155	Signifikan
<i>Fiscal Stress</i> (X_4)	1,647425	0,1305	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)

Uji t yang dapat dilihat dari hasil analisis regresi berganda pada Tabel 3 menyatakan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,742322 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,0038 < 0,05$). Dimana pengujian ini telah membuktikan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian. Berbanding lurus dengan pengujian oleh Rezka Marizka (2013) yang membuktikan bahwa PAD memiliki

pengaruh signifikan positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah, hasil yang sama terjadi pada penelitian yang telah saya kerjakan.

DAU tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian karena t_{hitung} sebesar -1,118290 dengan nilai signifikan sebesar 0,2896 atau lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini berbanding lurus dengan hasil pengujian oleh Monica Verginia (2017) yang mengatakan DAU tidak memiliki pengaruh pada kemandirian keuangan daerah.

Pada Tabel 1 nilai koefisien dari variabel bertanda negatif. Hal tersebut dikarenakan DAU ialah dana pemberian ke daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan guna menutupi belanja daerah yang berlebihan. Akan terjadi defisit pada anggaran saat kondisi di mana realisasi belanja daerah justru lebih besar daripada pendapatan daerah. Maka dari itu untuk menutupi kondisi di mana anggaran mengalami kondisi defisit maka daerah mendapatkan dana pinjaman dari pemerintah pusat seperti halnya DAU. Semakin banyak pemberian DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat maka mempertegas bahwa sudah seharusnya daerah mampu guna memenuhi keperluan daerahnya yang justru akan membuat tingkat kemandirian menjadi menurun.

Pada dasarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah apabila benar dalam pemanfaatannya, namun justru pada akhirnya gagal dimanfaatkan daerah dengan sebaik-baiknya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi stagnan sehingga pelaksanaan desentralisasi yang diimpikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah tidak terwujud. Akibat dari stagnannya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menyebabkan tingkat kemandirian tidak meningkat bahkan cenderung akan terus menurun karena pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan DAU dan akan terus-menerus bergantung pada DAU yang diterima dari pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerahnya.

DBH memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian karena t_{hitung} sebesar -2,910923 dengan nilai signifikan sebesar 0,0155 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini memiliki kesamaan dengan hasil pengujian oleh M. Abduh (2018) yang menyatakan DBH memiliki pengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sama halnya DAU, DBH sebenarnya mampu meningkatkan kemandirian suatu daerah apabila pemanfaatannya dilakukan secara baik dan benar. Pembagian jatah DBH itu sendiri yang menyatakan pemerintah daerah mendapatkan pembagian rata-rata sebesar 80% sedangkan pemerintah pusat 20% baik dari DBH yang bersumber dari pajak maupun DBH yang bersumber dari sumber daya alam, namun kenyataannya apa yang terjadi di lapangan tidak berlangsung demikian.

Dapat dilihat dari DBH yang berasal dari pajak yaitu salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebab yang terjadi di lapangan masalah objek pajak P2 dan P3 ditafsirkan beragam sehingga ada beberapa objek pajak PBB yang seharusnya masuk sektor P2 masih dipungut pada sektor P3 yang artinya dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat masih memiliki kendali yang kuat untuk memanfaatkan pembagian pendapatan dari DBH. Akibatnya basis pendapatan daerah yang memiliki potensi tinggi dalam hal ini yaitu berupa pajak seperti halnya PBB dan PPh pasal 21 justru berujung tidak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebutlah yang menjadikan DBH yang pada awalnya diharapkan mampu meningkatkan Tingkat Kemandirian justru menjadi menurunkan Tingkat Kemandirian daerah.

Fiscal Stress memiliki nilai t_{hitung} 1,647425 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,1305 > 0,05$). Di mana pengujian ini telah membuktikan bahwa variabel *Fiscal Stress* tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian. Hasil pengujian ini berbanding lurus dengan hasil pengujian milik M. Abduh (2018) dengan hasil penelitian *Fiscal Stress* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Tingkat Kemandirian).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan *Fiscal Stress* tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan; (3) Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu: (1) Objek penelitian hanya berfokus kepada Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Variabel yang digunakan hanya 4 variabel independen yaitu PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress*; (3) Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 15 tahun dihitung dari 2002-2016 namun dikhawatirkan hasil penelitian ini masih kurang mampu menggambarkan keadaan kondisi sebenarnya.

Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah terutama untuk Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan keterangan pada para pembaca yang berhubungan dengan pengaruh PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dilihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, daerah terutama pemerintah Kalimantan Selatan diharapkan dapat meningkatkan PAD karena menjadi faktor yang sangat mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah pun diharapkan agar mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah dinilai sangat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar Pustaka

- Abduh. (2018). *Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan (Tingkat Kemandirian) Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan. (2014). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Marizka, Reza. (2013). *Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016-2011*. Skripsi. Universitas Sumatera Barat, Padang.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Verginia, Monica. (2017). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Politeknik Negeri Padang.
- Yani, Ahmad. (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia). 2002. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.